

Laporan Pemantauan Perdamaian Aceh¹

1 Maret – 30 Juni 2009

Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik
Universitas Syiah Kuala



Ketika proses perdamaian masih terus berjalan, beberapa kejadian politik penting seperti pemilu legislatif dan kampanye pemilihan presiden terjadi dalam bulan Maret sampai dengan Juni 2009. Laporan ini melaporkan hasil pemantauan yang dilakukan selama periode tersebut, dimana tingkat kekerasan² masih tinggi. Hal ini terlihat dengan banyaknya insiden yang terjadi (29 Kasus). Sembilan kasus pembakaran dan pelemparan granat terhadap partai-partai politik terjadi pada bulan Maret dan awal bulan April. Dua kader Partai Aceh (PA)³ terbunuh dan seorang lagi lolos dari sebuah upaya (percobaan) pembunuhan. Sejak dimulainya kampanye pemilu legislatif pada bulan Juli 2008, insiden-insiden ini (terus) menambah jumlah kasus kekerasan yang berkaitan dengan Pemilu menjadi 73 kasus, termasuk 32 insiden pembakaran dan pelemparan granat serta enam upaya pembunuhan yang mengakibatkan lima orang tewas. Namun demikian, pemilu pada tanggal 9 April berjalan dengan damai dan hampir tidak ada kekerasan yang dilaporkan setelah tanggal tersebut. Banyak partai dan calon menentang hasil Pemilu dan ada tuduhan kecurangan pada tahap penghitungan suara, namun protes-protes berkurang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian besar kasus-kasus yang dilaporkan. Secara keseluruhan, meskipun adanya dugaan kekerasan dan intimidasi serta isu-isu yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan kelembagaan, pemilu legislatif tahun 2009 dapat dikatakan berjalan dengan cukup lancar di Aceh. Hasilnya, PA mendominasi kursi di DPRD dan sejumlah besar DPRK. Saat ini hasil tersebut telah diterima oleh sebagian besar para pelaku politik dan masyarakat. Sehubungan dengan tujuan membangun perdamaian, kemenangan mutlak PA merupakan sebuah langkah kemajuan dalam transformasinya dari gerakan gerilya menjadi organisasi politik biasa. Ini merupakan awal yang baik bagi keberlangsungan perdamaian, sehingga mulai saat ini PA harus dapat menunjukkan kapasitasnya untuk dapat berkontribusi secara positif terhadap pembuatan kebijakan dan menyelesaikan beberapa agenda yang masih tersisa dengan Jakarta sehubungan dengan interpretasi dan implementasi MoU Helsinki. Pada bulan-bulan setelah Pemilu, jumlah insiden konflik dan kekerasan berkurang secara signifikan hingga mencapai rekor paling rendah pada bulan Juni, yaitu hanya terdapat 69 konflik baru dan empat kasus kekerasan yang dilaporkan. Disisi lain, kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah kabupaten juga mengemuka dalam dua bulan terakhir.

¹ Mulai dari edisi ini, laporan ini akan berjudul Laporan Pemantauan Perdamaian Aceh. Ini mencerminkan transisi dari masa konflik ke proses perdamaian di Aceh. Mulai sejak edisi ini dan seterusnya, laporan ini akan diterbitkan oleh Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik (PSPRK / CPCRS) Universitas Syiah Kuala, yang didukung oleh Bank Dunia dan The Asia Foundation. Pendanaan diperoleh dari DFID, Kedutaan Besar Belanda serta dari Post-Conflict Fund Bank Dunia. Laporan ini menggunakan suatu metodologi pemetaan konflik surat kabar untuk mencatat dan menggolongkan insiden-insiden konflik di Aceh sebagaimana dilaporkan dalam salah satu surat kabar daerah (Serambi Indonesia). Laporan sebelumnya tersedia pada situs www.conflictanddevelopment.org. Dataset tersedia bagi yang berminat; hubungi cpcrs.usk@gmail.com. Ada keterbatasan dalam penggunaan surat kabar untuk pemetaan konflik; lihat Barron and Sharpe (2005) di www.conflictanddevelopment.org/page.php?id=412.

² Kekerasan dalam tulisan ini dikategorikan menjadi dua, pertama, bentuk konflik yang ada kekerasan (kontak senjata, penculikan, kerusakan, pertikaian, keroyokan, penganiayaan, pembunuhan, penembakan, pembakaran dan pengrusakan), kedua adalah bentuk kriminalitas yang ada kekerasannya (kontak senjata, penculikan, pengeledahan, pemerasan, penghadangan, kerusakan, pertikaian, keroyokan, penganiayaan, pembunuhan, penembakan, pembakaran, pengrusakan, ancaman, perampokan, percobaan pembunuhan, pemukulan, dan pemerkosaan).

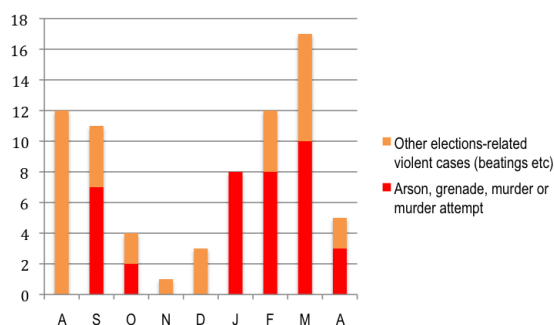
³ Partai Aceh merupakan partai politik yang dibentuk oleh mantan anggota GAM, afiliasi dari pergerakan gerilya separatis Aceh, pada pertengahan tahun 2007.

Tingkat kekerasan terkait Pemilu mencapai puncaknya selama minggu-minggu terakhir kampanye, namun tidak ada yang berujung pada eskalasi, dan kekerasan menurun setelah pemilu.

Kampanye Pemilu legislatif di Aceh tercoreng oleh serangan pembakaran dan granat terhadap partai politik, percobaan pembunuhan sejumlah caleg dan kader partai serta intimidasi yang merajalela. Namun demikian, tidak terdapat gangguan pada hari pemungutan suara dan hanya beberapa insiden dilaporkan setelahnya. Masih sulit untuk menilai luasnya dampak kekerasan dan bentuk lain intimidasi terhadap hasil Pemilu.

Jumlah insiden kekerasan yang berkaitan dengan Pemilu mencapai puncak dalam minggu-minggu terakhir sebelum hari pemungutan suara; 17 kasus dilaporkan terjadi pada bulan Maret (Gambar 1). Sebagian besar insiden terjadi selama periode kampanye terbuka setelah tanggal 16 Maret yaitu ketika partai - partai politik diizinkan untuk mengadakan acara pengerahan para pendukung partai di lapangan. Insiden - insiden pembakaran dan granat yang tercatat sejak bulan September 2008 terus berlangsung dengan sembilan kasus baru. Kader PA termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran upaya pembunuhan, dimana seorang calon legislatif nyaris tewas dalam suatu insiden penembakan di Aceh Barat, seorang anggota tim kampanye terbunuh di Nagan Raya, dan seorang kader lainnya tewas tertembak di Langsa hanya lima hari sebelum Pemilu. Meskipun demikian, tidak satupun dari insiden tersebut menuju pada eskalasi yang berarti dan tingkat kekerasan menurun dengan tajam setelah Pemilu dilangsungkan, dimana hanya ada tiga kasus dalam sepekan setelah 9 April (Lampiran A untuk daftar seluruh kasus kekerasan terkait Pemilu selama Maret-April). Tidak ada insiden lebih lanjut yang dilaporkan pada bulan Mei dan Juni.⁴

Gambar 1: Insiden kekerasan terkait Pemilu per bulan, Agustus 08 hingga April 09



Secara keseluruhan, sebanyak 73 insiden kekerasan yang terkait pemilu telah dilaporkan antara bulan Agustus 2008 dan akhir April 2009 (Gambar 1). Jumlah ini mencakup 32 kasus serangan pembakaran dan granat dengan sasaran partai-partai politik, dimana sebagian besar serangan (27 kasus) ditujukan kepada Partai Aceh. Hanya satu insiden yang menyebabkan adanya korban cedera yaitu sebuah ledakan granat terjadi di Lhokseumawe pada tanggal 11 Maret sehingga mencederai lima orang, termasuk tiga anggota KPA.⁵ Sejak bulan Februari hingga hari Pemilu, enam upaya pembunuhan terhadap para anggota KPA atau kader atau calon PA berakhir dengan lima orang meninggal. Penyebab persengketaan masih belum dipastikan sampai saat ini namun diduga persaingan politik ikut berperan dalam beberapa upaya pembunuhan tersebut.

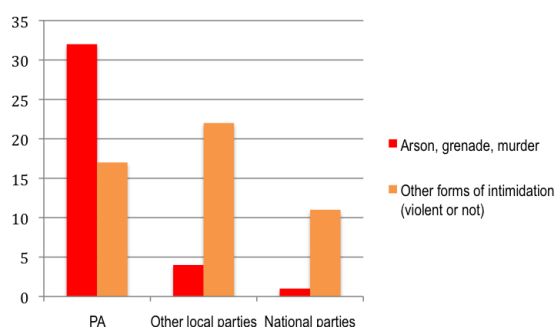
⁴ Sebuah granat meledak di rumah caleg Partai Barisan Nasional yang kalah di Bener Meriah pada tanggal 3 Mei. Namun demikian, insiden ini agaknya merupakan akibat dari sebuah perselisihan bisnis dan bukan dikarenakan Pemilu.

⁵ Komite Peralihan Aceh, KPA, merupakan organisasi sipil yang dibentuk untuk mewakili mantan kombatan GAM.

Meskipun insiden tersebut mempunyai potensi munculnya konflik, KPA dan PA bisa menahan diri, tidak terpancing, dan tidak membiarkan insiden-insiden tersebut memicu kekerasan lebih lanjut. Kemajuan yang cepat yang dilakukan oleh kepolisian dalam investigasi sejumlah kasus pada Maret dan April juga membantu mencegah eskalasi lebih lanjut. Kinerja kepolisian yang konsisten/ berkelanjutan dalam mencegah serangan terhadap PA dan menangkap para pelaku kejahatan telah menepis kecurigaan mengenai kemungkinan adanya keterlibatan aparat keamanan dalam tindak kekerasan tersebut. Ketegangan cukup tinggi terjadi terutama antara PA/KPA dengan pihak militer yaitu pada saat penurunan bendera PA oleh militer di Simpang Keuramat, Aceh Utara pada tanggal 02 Maret 2009. Namun demikian, penunjukan Jenderal Adityawarman sebagai Kapolda Aceh pada pertengahan Februari cepat disusul dengan sebuah terobosan penyelidikan. Sembilan tersangka telah ditahan sehubungan dengan 16 kasus kekerasan, termasuk serangan pembakaran dan granat terhadap partai politik. Semua tersangka tampaknya berada dalam jaringan yang sama, yang disebut sebagai “kelompok Abdul Razak” (Abdul Razak adalah nama salah satu pemimpinnya). Belum banyak informasi yang disampaikan kepada publik, namun kelompok ini sepertinya terdiri atas mantan kombatan yang tidak setuju dengan proses perdamaian di Aceh.⁶ Disamping beberapa insiden kekerasan sebelum Pemilu, kelompok Abdul Razak juga diduga terlibat dalam sejumlah penculikan tahun lalu, seperti terhadap tujuh warga negara Tionghoa di Gayo Lues pada bulan April 2008. Diharapkan bahwa persidangan terhadap kelompok ini akan menjawab sisa kecurigaan mengenai kemungkinan adanya keterkaitan antara para terdakwa dan pihak keamanan.⁷

Disamping insiden-insiden menonjol yang dibahas di atas, berbagai bentuk dugaan intimidasi lainnya seperti pemukulan terhadap para pendukung partai, ancaman dan kampanye yang menjelek-jelekkan partai lainnya, juga memberi tekanan terhadap pihak yang mengadakan kampanye dan terhadap para pemilih. Gambar 2 memperlihatkan bahwa meskipun PA paling sering menjadi sasaran dalam insiden kekerasan yang berat, pihak partai lokal lainnya dan partai nasional menjadi sasaran dari dua-pertiga insiden yang lebih ringan (pemukulan, penjarahan) serta bentuk intimidasi lainnya yang dilaporkan.

Gambar 2: Kasus kekerasan berat serta bentuk intimidasi lainnya yang diarahkan ke PA, partai lokal lainnya dan partai nasional Agustus 2008 hingga April 2009



PA dituding bertanggungjawab untuk sebagian besar kasus dimana sasarannya partai lain. Temuan riset di lapangan⁸ menunjukkan bahwa pada wilayah basis kekuatan GAM pada masa

⁶ Abdul Razak mengakui bahwa keempat mantan kombatan ‘anti-MoU’ yang terbunuh dalam baku-tembak dengan aparat keamanan di Beutong, Nagan Raya pada bulan Juli 2008 (lihat Laporan bulan Juli – Agustus 2008) merupakan bagian dari jaringannya.

⁷ Baru-baru ini, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri mengungkapkan bahwa salah satu tersangka adalah seorang polisi di Bireuen berpangkat brigadir. Ia diduga terlibat dalam sejumlah penculikan dan pembakaran kantor Partai SIRA di Bireuen pada tanggal 21 September 2008 (*Jakarta Globe*, 5 Juli).

⁸ Penelitian lapangan ini dilakukan dalam rangka studi yang sedang dijalankan oleh Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik dengan dukungan dari Bank Dunia, yang diperkirakan terbit pada bulan Oktober 2009.

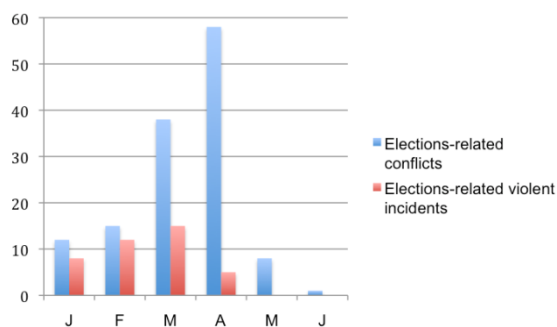
konflik di Pantai Timur, hampir semua partai lokal atau nasional kecuali PA dan PD tidak bisa melakukan kampanye sebagai akibat adanya tekanan-tekanan, atau memilih tidak mengadakan kampanye untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul. Para pendukung PA menggunakan berbagai cara untuk mencegah pesaingnya menjangkau pemilih dan masyarakat sehingga acara kampanye terbuka tidak bisa dihadiri. Upaya tersebut bisa berupa memblokir jalan yang menuju ke arah kota. Pada bulan Maret, terdapat empat kasus pemukulan kader partai lain oleh pendukung PA di Pidie, Aceh Utara dan Lhokseumawe (Lampiran A). Para saksi partai, yang bertugas untuk menghadiri TPS-TPS selama penghitungan suara untuk mencegah kecurangan, terkadang mengundurkan diri dari tugasnya setelah terkena ancaman.

Iklim intimidasi dan kekerasan ini telah membuka ruang bagi sejumlah peserta yang kalah untuk melempar tuduhan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilihan. Namun demikian, masih sulit untuk dinilai hingga batas mana intimidasi benar-benar berdampak terhadap kapasitas partai-partai politik dan calon-calonnya dalam menjangkau konstituennya ataupun berhasil dalam mempengaruhi para pemilih dari satu arah politik ke arah lainnya. Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa keputusan pemilih didasarkan pada berbagai pertimbangan di mana tekanan dan ancaman tidak mesti menjadi pertimbangan utama.

Perselisihan paskapemilu: ada laporan kecurangan akan tetapi secara umum hasilnya diterima

Walaupun tingkat kekerasan menurun setelah hari Pemilu, namun banyak perselisihan - perselisihan muncul setelah kejadian itu (Gambar 3).⁹ Beberapa diantaranya berkaitan dengan hal-hal yang terjadi pada hari Pemilu, seperti dugaan adanya upaya petugas TPS untuk mempengaruhi para pemilih. Perselisihan tersebut lebih banyak terkait dengan tuduhan kecurangan dalam penghitungan suara, kecaman terhadap lembaga-lembaga pelaksana Pemilu untuk berbagai keterlambatan dan ketidaksiapan, dan tantangan lebih luas terhadap legitimasi hasil Pemilu yang disebabkan kombinasi hal-hal tersebut.

Gambar 3: Perselisihan dan insiden kekerasan terkait Pemilu per bulan, Januari - Juni 09



Tudingan segera timbul bahwa penggelembungan suara berskala besar telah terjadi di sejumlah daerah pemilihan. Lima puluh dua kasus dari Aceh dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh 14 partai yang berbeda (lihat Tabel 1). Diduga ada lebih banyak lagi kasus, namun partai-partai memutuskan untuk hanya menindaklanjuti kasus-kasus yang dianggap berpeluang untuk menang dan menghasilkan kursi tambahan bagi partainya. Dari semua keluhan yang diajukan ke MK, hanya lima kasus yang dikabulkan, sehingga mengakibatkan PDIP kehilangan satu-satunya kursi miliknya di DPRD serta adanya perubahan-perubahan kecil dalam alokasi kursi di tiga DPRK. Di Bener Meriah, sejumlah partai melaporkan perbedaan-perbedaan yang besar antara penghitungan suara di TPS dengan hasil yang

⁹ Gambar 3 menunjukkan jumlah konflik baru per bulan. Perselisihan yang timbul setelah pemilihan dalam bulan April berlanjut ke bulan Mei dan Juni, namun hanya sedikit masalah baru yang timbul dalam dua bulan terakhir ini.

dikeluarkan oleh KIP kabupaten, tetapi dari empat kasus yang diajukan ke MK tidak ada yang dikabulkan.¹⁰

Tabel 1: Sidang Mahkamah Konstitusi mengenai kasus kecurangan Pemilu di Aceh

Kasus kecurangan berkaitan dengan Pemilu untuk ...	# kasus	# yang berhasil	Hasil
DPR-RI	1	0	Tidak ada
DPRA	15	1	PDIP kehilangan kursi, dan beralih ke PPP
DPRK	36	3	Di Aceh Utara satu kursi PD beralih ke PPD; Di Lhokseumawe satu kursi PDA beralih ke PBA; Di Nagan Raya satu kursi PBR beralih ke PA

Jika dibandingkan dengan Pilkada pada tahun 2006, potensi konflik pada tahun 2009 jauh berbeda. Hal terlihat pada Pilkada tahun 2006, potensi perselisihan terhadap hasil Pemilu untuk menjadi konflik berkelanjutan, terkadang dengan kekerasan, seperti yang terjadi di Aceh Tenggara (lihat Laporan Pemantauan Agustus 2007). Namun demikian, perselisihan yang timbul terkait Pemilu tahun ini tampaknya tidak berpotensi demikian. Meskipun hasil dari persidangan MK barangkali mengecewakan bagi para penggugat, protes-protes yang terjadi kemudian mereda. Hasil pemilu tampaknya telah diterima oleh para caleg, partai, dan juga oleh masyarakat umum.

Hasil Pemilu: Kemenangan PA merupakan langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan, meskipun masih ada tantangan baru terhadap pembuatan kebijakan di Aceh

Pemilu membawa kemenangan bagi PA baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Partai yang berafiliasi dengan GAM ini hampir saja mendapatkan mayoritas mutlak di DPRA dengan 33 kursi dari 69. PA menang mutlak pada enam kabupaten yang merupakan basis GAM pada masa lalu (dengan memperoleh antara 52 hingga 75 persen dari alokasi kursi di Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, dan Lhokseumawe) dan di Aceh Jaya, serta memperoleh antara 20 dan 36 persen kursi di sembilan kabupaten lainnya (lihat Aneks B untuk angka dan tabel mengenai hasil Pemilu). Di tujuh kabupaten yang tersisa, yang mencakup dataran tinggi, Aceh Singkil, Subulussalam dan Simeulue, tidak ada pemenang yang jelas dan kursi terbagi antara sejumlah partai, sebagian besar di antaranya partai nasional.

Partai Presiden Yudhoyono, Partai Demokrat (PD) muncul sebagai ‘pemenang kedua’ dalam Pemilu. PD tidak hanya memenangkan enam dari 13 kursi yang dialokasikan bagi Aceh untuk DPR-RI, namun mengambil pula tempat kedua setelah PA di DPRA (sepuluh kursi), dan muncul sebagai yang pemenang pertama atau kedua di banyak kabupaten.¹¹

Kemenangan bagi PA dan PD ini secara umum dapat diartikan sebagai ‘pilihan untuk perdamaian’. Pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga Aceh sepertinya menganggap bahwa kemenangan politik bagi partai yang berasal dari mantan pejuang / separatis ini merupakan penghargaan yang cocok atas ditinggalkannya perjuangan bersenjata, dan juga merupakan cara terbaik untuk mendorong keberlangsungan stabilitas politik di

¹⁰ PKS, yang mengajukan kasus kecurangan terhadap PAN dan PKPI dalam pemilihan untuk DPRA di Bener Meriah, memiliki data yang kuat untuk mendukung klaimnya. Namun dalam sebuah wawancara dengan PSPRK, seorang kader PKS menyatakan bahwa kecil harapannya bahwa mereka dapat menang, karena mereka “tidak memiliki cukup uang”. Ia menolak untuk menjelaskan apakah pernyataan tersebut mengacu kepada biaya operasional atau suap.

¹¹ Selama putaran pertama (dan terakhir) pemilihan presiden (Pilpres) pada tanggal 8 Juli, Presiden Yudhoyono memperoleh 93% suara di Aceh, jauh di atas peroleh suaranya secara nasional yang telah cukup meyakinkan yakni 60%.

provinsi ini. Mendukung kepemimpinan Yudhoyono merupakan aspek pelengkap dari cara pandang yang sama.¹² PA memahami ini dan menggunakannya sebagai suatu strategi berkampanye. Partai ini secara terbuka mempromosikan gagasan bahwa mendukung para pihak penandatanganan MoU Helsinki dengan memilih PA dalam pemilihan daerah dan PD pada tingkat DPR-RI merupakan satu-satunya cara untuk memperkokoh perdamaian.¹³

Partai-partai lokal selain PA tidak berhasil dalam Pemilu kali ini, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Partai Daulat Aceh (PDA), suatu partai yang berasal dari kaum ulama dan pesantren (dayah), merupakan satu-satunya partai selain PA yang mendapatkan kursi di DPRA, dan hanya memperoleh satu kursi. Oleh karena lima partai lokal gagal untuk memenuhi ambang batas lima persen kursi di DPRA (atau lima persen kursi di setengah DPRK), mereka tidak diizinkan untuk mengikuti Pemilu lagi pada tahun 2014. Sebagian besar dari partai-partai ini menyebut faktor intimidasi sebagai alasan kenapa mereka kalah. Meskipun memang ada alasan untuk mengatakan seperti itu (lihat bagian sebelumnya), posisi lemah mereka juga disebabkan oleh keberhasilan PA dalam mencitrakan diri sebagai satu-satunya partai lokal dengan kekuatan yang cukup memadai untuk berkompetisi dengan partai-partai nasional dan untuk berkerjasama dengan Jakarta dalam menyelesaikan agenda perdamaian di masa mendatang. Kemudian dari pada itu, PA berhasil karena dianggap bersih dari perpolitikan di Jakarta sehingga banyak masyarakat memilih PA dan sehingga PA menjadi percaya diri.

Kemenangan PA, yang mengikuti kemenangan para mantan anggota GAM dalam pemilihan gubernur dan sepuluh pemilihan bupati pada tahun 2006-2007, merupakan langkah lanjutan dalam transformasi GAM menjadi pelaku politik yang sah. Ini merupakan pertanda baik untuk perdamaian yang berkelanjutan, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan. Banyak calon PA merupakan mantan kombatan atau perwakilan sipil GAM dengan pengalaman yang minim mengenai prosedur lembaga legislatif. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh orang dengan latar belakang GAM telah menerima kritik yang tajam karena kurangnya kapasitas, dugaan korupsi yang merajalela dan ketidakmampuan untuk menahan tekanan KPA yang meminta bantuan dan perlakuan khusus. Beberapa kepala daerah yang berafiliasi dengan GAM telah berupaya untuk melawan permintaan seperti itu dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, dengan hasil yang beragam. Upaya mereka selanjutnya diperkirakan semakin rumit pada saat bernegosiasi dengan parlemen yang didominasi oleh PA. PA juga berkampanye dengan menekankan satu program utama: pelaksanaan yang komprehensif atas MoU serta revisi sejumlah pasal UUPA yang dipandang bermasalah oleh kepemimpinan GAM dilihat dari konteks maksud dari perjanjian perdamaian.¹⁴ Perselisihan lama mengenai definisi otonomi pemerintahan Aceh telah menjadi ganjalan hubungan antara DPRA dan Jakarta selama tahun-tahun terakhir ini. Hubungan antara keduanya harus selalu dan terus dipantau agar tidak berujung pada perbedaan pendapat yang serius – terutama karena DPRA sekarang berada di bawah kendali PA.

¹² Wakil Presiden Yusuf Kalla juga memainkan peran kunci dalam pencapaian perdamaian, namun partainya, Golkar, masih menanggung beban berkaitan atas tata kelola pemerintahan yang buruk pada masa konflik di Aceh.

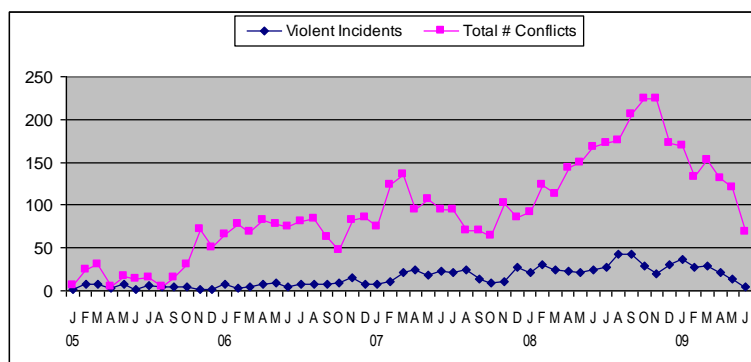
¹³ PA secara aktif juga menudukung Presiden Yudhoyono selama pemilihan presiden. Pertimbangan pragmatis juga bermain di sini. Mendukung Presiden Yudhoyono dan partainya memastikan PA memperoleh sekutu yang kuat di DPR-RI, di mana partai lokal tidak memiliki perwakilan.

¹⁴ Menurut kepemimpinan GAM, ada dua puluh satu pasal MoU yang belum sepenuhnya dilaksanakan atau telah dikurangi dalam UUPA

Tren secara keseluruhan: setelah Pemilu, tingkat kekerasan dan konflik mencatat tingkat yang paling rendah

Hasil pemantauan, jumlah insiden kekerasan secara bulanan maupun jumlah konflik (baik disertai kekerasan maupun tanpa kekerasan) menurun dengan tajam ke tingkat yang sangat rendah setelah Pemilu (lihat gambar 4).

Gambar 4: Konflik dan insiden kekerasan per bulan



Tingkat kekerasan tetap tinggi selama bulan Maret (29 insiden) dengan adanya insiden-insiden terkait Pemilu (17 kasus, hampir 60% dari seluruh kasus kekerasan dalam bulan Maret). Kekerasan terkait Pemilu juga berkontribusi secara berarti terhadap jatuhnya korban selama bulan Maret: satu orang tewas dan 13 cedera (dari total tiga tewas dan 19 orang cedera). Setelah Pemilu berlalu dan kekerasan politik mereda, jumlah insiden kekerasan bulanan menurun menjadi 22 kasus selama bulan April (di mana hanya lima yang berkaitan dengan Pemilu), 14 kasus selama bulan Mei dan hanya empat kasus dalam bulan Juni – yang merupakan jumlah paling rendah selama ini.¹⁵ Dari keenam kematian dan tiga puluh orang cedera yang dilaporkan dalam ketiga bulan ini, hanya pembunuhan seorang kader PA pada hari-hari terakhir sebelum hari Pemilu yang mungkin dapat dikaitkan dengan Pemilu. Sebagian besar korban cedera lainnya berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri dan sengketa pribadi.¹⁶

Jumlah konflik bulanan juga mengalami penurunan yang sangat tajam dari bulan Maret hingga Juni, turun menjadi 69 kasus pada bulan lalu. Pilkada pada bulan Desember 2006 juga diikuti dengan penurunan tingkat konflik meskipun tidak begitu menonjol. Periode dengan tingkat konflik rendah ini, setelah ketegangan yang mewarnai sebuah periode Pemilu yang panjang selama sembilan bulan sejak 12 Juni hingga 9 April, sebagian disebabkan karena perselisihan yang memerlukan arbitrase parlemen harus menunggu hingga para anggota parlemen dilantik pada bulan September 2009.

Konflik terkait korupsi meningkat pada bulan Mei (26 kasus), dengan sejumlah kasus yang menonjol. Ini termasuk penggelapan dana Rp. 220 milyar (sekitar US\$ 22 juta) dari anggaran pemerintah kabupaten Aceh Utara, sebuah skandal yang mungkin melibatkan pejabat daerah. Kepala Kamar Dagang dan Industri Aceh Utara dan Koordinator tim asistensi Pemerintah kabupaten telah ditahan. Sekretaris Daerah Kabupaten (setdakab) telah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Bupati dan Wakil Bupati juga harus memberi keterangan di depan Panitia Khusus (Pansus) DPRK, namun bukti yang ada kurang memadai terhadap keterlibatan mereka dalam kasus penggelapan dana tersebut. Jumlah dana yang digelapkan sangat besar, setara

¹⁵ Terakhir kali jumlah kasus kekerasan bulanan berada di bawah lima kasus adalah pada bulan Februari 2006.

¹⁶ Angka-angka yang disebutkan tidak termasuk tindak kriminal yang disertai kekerasan. Setelah berada pada tingkat yang relatif rendah selama bulan-bulan terakhir kampanye, tindak kriminal disertai kekerasan mengalami puncaknya dalam bulan Mei dengan total 10 kasus penculikan dan perampokan bersenjata.

atau lebih kurang hampir 20 persen dari jumlah pendapatan Pemerintah Aceh Utara untuk tahun 2006 dan 15 persen dari pengeluaran kabupaten tersebut pada tahun 2007. Aceh Utara merupakan kabupaten yang memiliki pendapatan paling tinggi di provinsi ini, tetapi kemiskinannya berada di peringkat kedua pada tahun 2006. Kasus ini menggambarkan sebuah contoh ekstrim dari tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan di Aceh, sebuah provinsi yang kaya karena pengaturan ekonomi sehubungan status otonomi khususnya,¹⁷ tetapi kemampuan penggunaannya dirusak oleh buruknya kapasitas tata kelola pemerintahan dan maraknya praktek korupsi.

¹⁷ Pemasukan dari Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berkontribusi sejumlah Rp. 1,9 trilyun (US\$ 190 juta) terhadap APBA pada tahun 2007, atau 60% dari pemasukan provinsi. Sumber semua angka yang disebutkan di atas adalah Laporan Analisa Pembiayaan Publik Aceh, Bank Dunia, 2008.

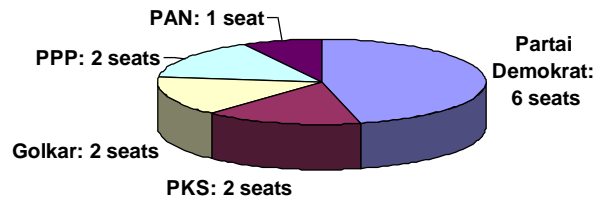
Lampiran A: Kekerasan yang berkaitan dengan Pemilu, Maret-April 2009¹⁸

- 3 Maret, *Lhokseumawe*. Sebuah granat dilemparkan ke sebuah kantor PA namun tidak meledak.
- 11 Maret, *Lhokseumawe*. Sebuah granat dilemparkan ke warung "Reintegrasi" dan meledak, mencederai lima orang termasuk tiga anggota KPA.
- 15 Maret, *Aceh Barat*. Seorang calon PA ditembak dan terluka.
- 15 Maret, *Aceh Tenggara*. Pembakaran sebuah kantor PA.
- 19 Maret, *Pidie*. Seorang calon SIRA melaporkan penyerangan yang dilakukan seorang pendukung PA.
- 20 Maret, *Nagan Raya*. Tumijan, seorang anggota tim kampanye Juragan, calon PA, ditemukan tewas dengan leher terpotong.
- 20 Maret *Aceh Utara*. Seorang calon PBA melaporkan telah dianiaya oleh seorang pendukung PA.
- 20 Maret, *Pidie*. Seorang kader PKNU melaporkan penganiayaan oleh caleg PA terhadap caleg lainnya.
- 21 Maret, *Bireuen*. Sebuah granat meledak di rumah Wakil Bupati Bireuen, melukai seorang pembantu.
- 26 Maret, *Bener Meriah*. Sebuah granat meledak di rumah seorang caleg PA.
- 26 Maret, *Lhokseumawe*. Pemukulan seorang kader PKS oleh seorang kader PA.
- 27 Maret, *Aceh Singkil*. Pembakaran sebuah kendaraan SIRA.
- 28 Maret, *Bireuen*. Pelemparan batu ke sebuah truk yang membawa pendukung SIRA dalam sebuah pawai.
- 28 Maret, *Aceh Barat*. Pembakaran sebuah rumah milik caleg perempuan PA.
- 30 Maret, *Subulussalam*. Sebuah granat meledak di rumah Ketua PA Sabulussalam.
- 4 April, *Langsa*. Seorang sekretaris PA tingkat sagoe ditembak mati di jalan.
- 6 April, *Bireuen*. Pembakaran sebuah mobil SIRA.
- 11 April, *Lhokseumawe*. Pembakaran rumah seorang saksi PA.
- 11 April, *Aceh Tengah*. Kantor Panswalu kabupaten dirusak.
- 13 April, *Bener Meriah*. Dua puluh empat ruko diduga dibakar habis di pasar Simpang Balik, sebuah daerah yang ditempati oleh penduduk Aceh (etnis minoritas di dataran tinggi tengah) dan dikenal sebagai sebuah basis pemilih PA. Salah seorang caleg PA yang memenangkan kursi di DPRD Bener Meriah berasal dari Simpang Balik.

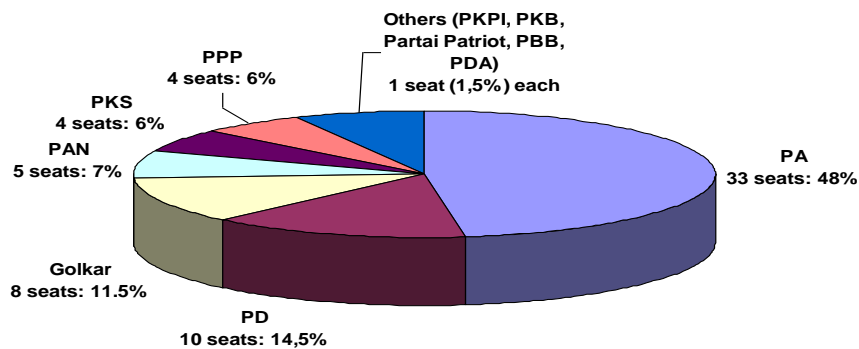
¹⁸ Untuk kronologi insiden-insiden sebelumnya, lihat Laporan September 2008 hingga Februari 2009.

Lampiran B: Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Aceh

Gambar B1: Pemilu untuk DPR-RI – 13 Kursi untuk Aceh



Gambar B2: Komposisi DPRA – 69 kursi



Tabel 1: Hasil pemilihan DPRK

Komposisi DPRK	# kabupaten	Nama Kabupaten
PA mayoritas mutlak > 50% kursi	7	Pidie (PA: 75% kursi); Aceh Utara, Aceh Timur dan Bireuen (71%); Aceh Jaya (70%); Pidie Jaya (64%); Lhokseumawe (52%)
PA memperoleh seperempat hingga lebih dari sepertiga kursi (28 – 36%)	4	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Sabang, Aceh Besar
Suara terbagi di antara banyak partai, namun PA tetap merupakan fraksi terbesar atau kedua terbesar	5	Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Barat, Nagan Raya, Banda Aceh
Suara terbagi di antara banyak partai, PA merupakan minoritas yang lemah dan perlu mengupayakan sebuah koalisi	5	Bener Meriah, Aceh Tengah, Simeulue, Gayo Lues, Aceh Tenggara
Suara terbagi di antara banyak partai, tidak ada kursi PA	2	Aceh Singkil, Subussalam